

**PENGARUH KETIMPANGAN GENDER TERHADAP  
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)  
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2023  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

**Miranda Indra Pratama  
NPM. 1751010095**

**Program Studi : Ekonomi Syari'ah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

**PENGARUH KETIMPANGAN GENDER TERHADAP  
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)  
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2023  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam Ilmu  
Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

**Miranda Indra Pratama  
NPM. 1751010095**

**Program Studi : Ekonomi Syari'ah**

Pembimbing I : Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I.

Pembimbing II : Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

## ABSTRAK

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, sebanyak 4.042.456 jiwa atau 49% dari jumlah penduduk Lampung adalah perempuan pada tahun 2019. Namun, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan hanya 48,43% dan masih tersentralisasi di sektor dengan produktivitas relatif rendah, dimana komposisi pekerja informal lebih dari 65%.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dalam bentuk data yang sudah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variabel angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah secara parsial dan simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Lampung tahun 2015-2023.

**Kata Kunci: Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Ketimpangan Gender, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Ekonomi Islam**

## **ABSTRACT**

*Based on data released by the Central Statistics Agency (BPS) of Lampung Province, as many as 4,042,456 people or 49% of the total population of Lampung were women in 2019. However, the Women's Labor Force Participation Rate is only 48.43% and is still centralized in sectors with relatively low productivity, where the composition of informal workers is more than 65%.*

*This study aims to determine the effect of life expectancy and average length of schooling on the labor force participation rate in Lampung Province. This research uses a descriptive quantitative approach, with data collection techniques with documentation methods. The data used is secondary data obtained in the form of data that has been collected and published by the Central Statistics Agency of Lampung Province.*

*The results showed that the variable life expectancy and average length of schooling partially and simultaneously did not have a significant effect on the level of labor force participation in Lampung Province in 2015-2023.*

***Keywords: Life Expectancy, Average Length of Schooling, Gender Inequality, Labor Force Participation Rate, Islamic Economy***



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Letko H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721)703260

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miranda Indra Pratama  
NPM : 1751010095  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Ketimpangan Gender terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Lampung Tahun 2015-2023 dalam Perspektif Ekonomi Islam” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 Mei 2024



Miranda Indra Pratama

NPM. 1751010095





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Dr. Letkol H. Endro Suratmih, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 7082360

SURAT PERSETUJUAN


Judul : Pengaruh Ketimpangan Gender terhadap  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di  
Provinsi Lampung Tahun 2015-2023 dalam  
Perspektif Ekonomi Islam  
Nama : Miranda Indra Pratama  
NPM : 1751010095  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden  
Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Mardhyah Hayati S.P.M.S.I.  
NIP. 197605292008012010

  
Okta Supriyaningsih S.E., M.E.Sy  
NIP. 2013010919841028163

Ketua Jurusan

  
Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy  
NIP. 198208082011012009





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi, dengan judul "Pengaruh Ketimpangan Gender terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Lampung Tahun 2015-2023 dalam Perspektif Ekonomi Islam" disusun oleh Miranda Indra Pratama, NPM : 1751010095, program studi Ekonomi Syariah, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Selasa /7 Mei 2024

TIM PENGUJI

- Ketua : Suhondar, S.E., M.S.Ak., Ak.
- Sekretaris : Alief Rakhman Setyanto, M.E.
- Penguji I : Dimas Pratomo, M.E.
- Penguji II : Okta Supriyaningsih, S.E., M.S.Ak.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Ak., CA.

NIP. 198008012003121001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (Q.S Al-hujurat : 13)





## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi. Dari hati penulis yang paling dalam, skripsi ini aku persembahkan kepada orang tuaku Bapak Ramlie dan Ibu Rilyaana yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan baik berupa moril maupun materil dengan sepenuh hati kepada penulis. Kepada almamater tempatku menimba ilmu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semoga semakin berkualitas dan berintegritas dalam mencerdaskan penerus bangsa.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Miranda Indra Pratama, dilahirkan di Bandar Sari, 19 Mei 1999. Anak pertama dari dua bersaudara yang merupakan anak kandung dari pasangan Bapak Ramlie, dan Ibu Rilyaana. Pendidikan dimulai pada jenjang TK PGRI Payung Rejo lulus pada tahun 2005, melanjutkan ke jenjang SD Negeri Payung Rejo Lulus Pada Tahun 2011, Melanjutkan kependidikan selanjutnya SMP N 2 Pubian Lulus Pada 2014, SMA N 1 Pringsewu 2017, Melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya di UIN Raden Intan Lampung Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2017.

Bandar Lampung, 13 Mei 2024  
Yang Membuat



Miranda Indra Pratama  
1751010095

## KATA PENGANTAR

### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT, Rab semesta alam. Shalawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Ketimpangan Gender terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Lampung Tahun 2015-2023 dalam Perspektif Ekonomi Islam”** sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar sarjana dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis islam. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy, selaku Kepala Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang membimbing selama masa studi hingga akhirnya kami dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Mardhiyah Hayati, S.P, M.S.I dan Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy selaku pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan banyak waktu serta memberikan arahan dengan sabar untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
5. Kepada seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan terbaik untuk mendapatkan informasi serta sumber referensi.
6. Teman-teman seperjuangan Kelas A Ekonomi Syariah 2017, yang telah kebersamai penulis dalam menimba ilmu dalam aspek akademik.



Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan berkenan membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 13 Mei 2024  
Yang Membuat,

Miranda Indra Pratama  
NPM. 1751010095



## DAFTAR ISI

|  | Halaman      |
|--|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | <b>ii</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>iii</b>   |
| <b>ABSTRACT</b> .....  | <b>iv</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....                                      | <b>v</b>     |
| <b>SURAT PERSETUJUAN</b> .....                                     | <b>vii</b>   |
| <b>PENGESAHAN</b> .....  | <b>viii</b>  |
| <b>MOTTO</b> .....   | <b>ix</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....   | <b>x</b>     |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b> .....   | <b>xi</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>xii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xiv</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | <b>xvi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....   | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                                       | <b>xviii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |              |
| A. Penegasan Judul .....   | 1            |
| B. Latar Belakang Masalah .....                                    | 2            |
| C. Identifikasi .....  | 9            |
| D. Batasan Masalah .....   | 9            |
| E. Rumusan Masalah .....   | 9            |
| F. Tujuan Penelitian .....   | 10           |
| G. Manfaat Penelitian .....  | 11           |
| H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....                  | 11           |
| I. Sistematika Penulisan .....                                     | 15           |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS</b>               |              |
| A. Teori Yang Digunakan  |              |
| 1. Gender .....  | 17           |
| 2. Ketimpangan Gender .....  | 20           |
| 3. Ketimpangan Gender dalam Perspektif Islam .....                 | 29           |
| 4. Rata-Rata Lama Sekolah .....                                    | 30           |
| 5. Angka Harapan Hidup .....                                       | 31           |
| 6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja .....                        | 33           |
| 7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dalam Perspektif Islam ..... | 36           |
| 8. Ekonomi Islam .....   | 38           |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| B. Kerangka Berpikir .....   | 39 |
| C. Pengajuan Hipotesis ..... | 40 |

**BAB III METODE PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Waktu dan Tempat Penelitian .....               | 43 |
| B. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....           | 43 |
| C. Populasi, Sampel, Teknik Pengumpulan Data ..... | 44 |
| D. Definisi Operasional Variabel .....             | 45 |
| E. Instrumen Penelitian .....                      | 47 |
| F. Uji Validitas dan Realibilitas data .....       | 47 |
| G. Uji Prasarat Analisis .....                     | 48 |
| H. Uji Hipotesis .....                             | 50 |

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Deskripsi Data .....                | 53 |
| B. Pembahasan Analisis dan Hasil ..... | 60 |
| C. Pembahasan Hasil Penelitian .....   | 67 |

**BAB V PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan .....  | 75 |
| B. Rekomendasi ..... | 76 |

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

| <b>Tabel</b>   | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| 1.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Lampung Tahun 2015-2023 .....                                  | 5              |
| 1.2 Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....   | 12             |
| 3.1 Definisi Operasional Variabel .....  | 46             |
| 4.1 Data Angka Harapan Hidup di Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2023 .....                  | 56             |
| 4.2 Data Angka Harapan Hidup di Provinsi Lampung Tahun 2015-2023 .....   | 56             |
| 4.3 Data Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2023 .....               | 57             |
| 4.4 Data Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Lampung Tahun 2015-2023 .....                                      | 58             |
| 4.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota tahun 2015-2023 ..... | 59             |
| 4.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Lampung Tahun 2015-2023 .....                        | 59             |
| 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas .....  | 61             |
| 4.8 Hasil Uji Autokorelasi .....   | 62             |
| 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....  | 62             |
| 4.10 Hasil Regresi Linear Berganda .....   | 63             |
| 4.11 Hasil Uji t .....   | 64             |
| 4.12 Hasil Uji F .....   | 65             |
| 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....   | 66             |

## DAFTAR GAMBAR

| <b>Gambar</b>                                  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| 2.1 Kerangka Berfikir .....                    | 40             |
| 4.1 Struktur Organisasi Provinsi Lampung ..... | 55             |
| 4.2 Hasil Uji Normalitas .....                 | 60             |



## DAFTAR LAMPIRAN

| <b>Lampiran</b>  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| Lampiran 1 : Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Lampung Tahun 2015-2023 .....                           | 83             |
| Lampiran 2 : Data Angka Harapan Hidup di Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015/2023 .....           | 83             |
| Lampiran 3 : Data Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015/2023 .....        | 84             |
| Lampiran 4 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Lampung Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015/2023 ..... | 84             |
| Lampiran 5 : Uji Normalitas .....  | 85             |
| Lampiran 6 : Uji Multikolinearitas .....   | 85             |
| Lampiran 7 : Uji Autokorelasi .....  | 85             |
| Lampiran 8 : Uji Heteroskedastisitas .....   | 86             |
| Lampiran 9 : Regresi Linear Berganda, Uji t, dan Uji f .....   | 86             |
| Lampiran 10 : Uji Koefisien Determinasi .....  | 86             |



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “**PENGARUH KETIMPANGAN GENDER TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2023 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**” pada bagian ini penulis akan menjelaskan beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi :

1. **Pengaruh**, ialah dorongan atau bujukan yang sifatnya dapat membentuk atau menghasilkan suatu efek tertentu.<sup>1</sup>
2. **Ketimpangan Gender**, ialah kondisi dimana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup>
3. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**, ialah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas.<sup>3</sup>
4. **Perspektif**, ialah gambaran atau pandangan atau dapat dikatakan sebagai suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.<sup>4</sup>
5. **Ekonomi Islam**, ialah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untung memandang, menganalisis, dan

---

<sup>1</sup> Candhrika Meida Padma, *Pengaruh Feminisme terhadap Kedudukan Perempuan Jepang Pasca Perang Dunia II*, Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas Darma Persada, 2018.

<sup>2</sup> Lisa Nazmi dan Abd Jamal, *Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah Vol.3 No.4 November 2018.

<sup>3</sup> Kadek Borgan Bonerri, *Pengaruh Pendidikan dan Upah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Manado*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 18 No. 01 2018.

<sup>4</sup> Elvinato Ardianto, Bambang Q-Aness, *Filsafat Ilmu Komunikasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), h. 50

akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.<sup>5</sup>

Berdasarkan pada penjabaran dari judul skripsi yang ada diatas, maka dapat diperjelas kembali dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah tentang Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Lampung Tahun 2015-2023 dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Hal ini tentunya berkaitan dengan bagaimana ketimpangan gender mengenai perbedaannya antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, serta kesulitannya dalam mencari pekerjaan yang layak, ini merupakan suatu tolak ukur yang dapat digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh ketimpangan gender terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang ada di Provinsi Lampung, karena pembagian peran tidak akan menjadi masalah selama laki-laki dan perempuan diperlakukan secara adil sesuai dengan kebutuhannya dan tidak merugikan salah satunya.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Pada tahun 2015 merupakan target keberhasilan dari tujuan pembangunan MDGs, Indonesia mempunyai komitmen untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan MDGs salah satunya yaitu dengan mendorong agar tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan. Dengan berakhirnya MDGs kemudian dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), didalam SDGs Indonesia juga mempunyai komitmen untuk melanjutkan tujuan pembangunan salah satunya yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.17

<sup>6</sup>Ardiyana Yunika Infarizki, Gentur Jalunggono, dan Lorentino Togar Laut, *Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Tengah Tahun 2010 – 2018*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tidar.

*Sustainable Development Goals* (SDGs) atau konsep pembangunan berkelanjutan yang dideklarasikan PBB pada September 2015 dimana salah satu tujuan dari tujuh belas tujuan yang memuat didalamnya yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa isu mengenai kesetaraan gender merupakan masalah global yang dihadapi semua negara maju atau negara berkembang termasuk di Indonesia.<sup>7</sup>

Gender merupakan salah satu indikator dalam mengukur suatu perbedaan atau persamaan non biologis diantara laki-laki dan perempuan sebagai tingkat keberhasilan suatu pembangunan. Dalam istilah ini seringkali disandingkan dengan kesetaraan dalam hak sebagai makhluk hidup sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pengertiannya dikarenakan konsep gender yang tidak tertuju mengenai sebuah jenis kelamin tertentu. Sedangkan kesetaraan gender berarti dimana laki-laki dan perempuan memiliki status, kondisi, dan potensi dalam merealisasikan hak-haknya sebagai manusia dan berkontribusi dalam pembangunan. Suatu wujud dari hal tersebut adalah dengan tidak adanya deskriminasi antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam merasakan pembangunan nasional, dengan adanya ketidakadilan atau ketimpangan dalam gender dapat mengakibatkan terhambatnya potensi pembangunan negara.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perkembangan yang pesat dalam mengurangi ketimpangan di bidang pendidikan antara laki-laki dan perempuan yang ditandai dengan semakin mengecilnya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam capaian tingkat pendidikan. Walaupun demikian, tingkat produktivitas dan partisipasi angkatan kerja perempuan masih dikategorikan rendah. Peran perempuan dalam pembangunan perlu terus diperhatikan dalam kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Karena peningkatan peran perempuan mempunyai dampak penting dalam memutuskan lingkaran setan kemiskinan. Perbaikan kualitas manusia

---

<sup>7</sup> Arif Sofianto, *Integrasi Target dan Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) ke Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Jawa Tengah*, Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah Vol. 17 No. 01, Juni 2019.

perempuan khususnya dalam hal pendidikan menjadi isu penting karena sangat menentukan kualitas hidup pada generasi mendatang.<sup>8</sup>

Ketimpangan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di Indonesia, masih terdapat gap atau jarak dalam pencapaian suatu manfaat hasil pembangunan pada perempuan terhadap laki-laki yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat deskriminasi sangat bervariasi di berbagai wilayah/provinsi.

Masyarakat mengenal secara luas mengenai istilah gender dalam hal tulisan maupun forum. Akan tetapi, istilah gender selalu digunakan dengan tidak tepat. Karena akan menimbulkan ketidakjelasan pada pengertian gender itu sendiri. Konsep gender tidak selalu fokus mengenai jenis kelamin tertentu. Gender dengan jenis kelamin sangatlah berbeda, gender fokus pada hubungan sosial antara anak laki-laki dan perempuan, serta bagaimana hubungan sosial ini di konstruksikan. Peran gender ini sendiri bersifat dinamis dan bisa berubah antar waktu.<sup>9</sup>

Pertumbuhan ekonomi meningkatkan kesempatan kerja tetapi tidak dengan sendirinya mengurangi ketimpangan gender. Ketimpangan gender dalam bidang ketenagakerjaan masih merupakan isu dan permasalahan yang sering terjadi. Data menunjukkan perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara laki-laki dan perempuan di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 82,51 untuk laki-laki dan 50,89 untuk perempuan, hal ini menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini berbanding terbalik dengan perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki yang berusia 15 tahun ke atas yaitu sebesar 96,7 juta jiwa untuk perempuan dan 95,88 juta jiwa untuk laki-laki. Berdasarkan data-data tersebut dapat

---

<sup>8</sup>Agnes Vera Yanti Sitorus, *Dampak Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Sosio Informa Vol. 2 No. 01 Januari – April 2016

<sup>9</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

menunjukkan bahwa 47,24 juta jiwa perempuan pada usia produktif di Indonesia tidak aktif secara ekonomi. Berdasarkan studi yang dilakukan di sebagian besar negara berkembang, ketimpangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara laki-laki dan perempuan sudah umum terjadi.<sup>10</sup> Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada perempuan di Lampung pun masih tergolong minim. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, sebanyak 4.042.456 jiwa atau 49% dari jumlah penduduk Lampung adalah perempuan pada tahun 2019. Namun, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan hanya 48,43% dan masih tersentralisasi di sektor dengan produktivitas relatif rendah, dimana komposisi pekerja informal lebih dari 65%.

Gender juga memiliki indeks pembangunan, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG). Dalam hal dimensinya, akan tetapi Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur mengenai ketimpangan dalam pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan perempuan.

**Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)  
di Provinsi Lampung Tahun 2015-2023**

| Wilayah                 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) |               |               |               |               |               |               |              |              |
|-------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                         | 2015                            | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022         | 2023         |
| Lampung Barat           | 91,650                          | 92,210        | 92,470        | 92,740        | 92,550        | 92,950        | 93,000        | 93,4         | 93,47        |
| Tanggamus               | 89,790                          | 90,490        | 90,710        | 91,140        | 90,880        | 91,130        | 90,890        | 91,1         | 91,27        |
| Lampung Selatan         | 88,890                          | 89,120        | 89,520        | 89,870        | 89,540        | 89,600        | 89,610        | 89,78        | 89,96        |
| Lampung Timur           | 87,510                          | 87,660        | 87,850        | 88,670        | 88,780        | 88,830        | 88,780        | 89,22        | 89,6         |
| Lampung Tengah          | 89,080                          | 89,170        | 89,230        | 89,570        | 89,880        | 89,870        | 89,940        | 90,11        | 90,02        |
| Lampung Utara           | 87,850                          | 88,350        | 88,690        | 89,340        | 89,480        | 89,460        | 89,580        | 89,74        | 89,79        |
| Way Kanan               | 87,540                          | 87,680        | 87,850        | 88,250        | 89,220        | 88,190        | 88,320        | 88,5         | 88,64        |
| Tulang Bawang           | 88,080                          | 88,240        | 88,510        | 88,690        | 89,170        | 89,310        | 89,560        | 90,18        | 90,26        |
| Pesawaran               | 86,130                          | 86,760        | 87,250        | 87,570        | 87,300        | 87,200        | 87,220        | 87,77        | 88,04        |
| Pringsewu               | 92,370                          | 92,410        | 92,260        | 92,590        | 92,370        | 92,330        | 92,290        | 92,5         | 92,68        |
| Mesuji                  | 84,380                          | 83,620        | 83,820        | 84,490        | 84,220        | 84,170        | 84,370        | 84,47        | 84,63        |
| Tulang Bawang Barat     | 87,930                          | 87,990        | 88,080        | 88,530        | 88,450        | 88,560        | 88,960        | 89,04        | 89,01        |
| Pesisir Barat           | 92,070                          | 92,530        | 92,840        | 93,400        | 93,220        | 93,210        | 93,510        | 93,95        | 94,25        |
| Bandar Lampung          | 93,690                          | 93,750        | 93,840        | 93,550        | 93,960        | 93,860        | 93,930        | 94,02        | 94,14        |
| Metro                   | 94,640                          | 94,880        | 94,970        | 94,980        | 95,020        | 95,550        | 95,890        | 95,9         | 95,99        |
| <b>Provinsi Lampung</b> | <b>89,890</b>                   | <b>90,300</b> | <b>90,490</b> | <b>90,570</b> | <b>90,390</b> | <b>90,330</b> | <b>90,370</b> | <b>90,58</b> | <b>90,75</b> |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2015-2023

<sup>10</sup> Yeni Nuraeni, dan Ivan Lilin Suryono, *Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 20 No. 01 Tahun 2021.



Berdasarkan pada tabel 1.1 mengenai Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Lampung pada tahun 2015-2023 di atas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Lampung mengalami fluktuasi atau memperlihatkan angka yang naik turun pada setiap tahunnya. Namun, jika dilihat dari angka terendahnya sebesar 89,890 yang terjadi pada tahun 2015 sedangkan angka tertinggi sebesar 90,570 yang terjadi pada tahun 2018.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan penjelasan mengenai dalam hal untuk mengetahui ketimpangan gender menggunakan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG), mengukur kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Cara mengukurnya dengan dilihatnya yaitu bahwa apabila semakin mendekati angka 100, maka semakin rendah kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.<sup>11</sup>

Secara komponen yang mempengaruhi dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau ketimpangan gender yaitu terdiri dari Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai indikator dari bidang kesehatan dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebagai indikator dari bidang pendidikan.

Ketimpangan gender dalam dunia kerja masih kerap terjadi yang disebabkan dari institusional dan dorongan kultur sosial yang terkait dengan pendidikan, pengalaman kerja, diskriminasi, eksklusivitas di bidang kerja tertentu dan sebagainya. Dikarenakan masih banyak perusahaan-perusahaan besar atau kecil di dunia kerja yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dengan beranggapan bahwa laki-laki sebagai kaum yang lebih dapat diandalkan dalam mengerjakan pekerjaan pada semua bidang. Ketimpangan gender masih menjadi pembatas bagi perempuan untuk memilih dan berpartisipasi didalam dunia kerja.

Upaya dalam mencari keadilan mengenai ketimpangan gender sangat mendominasi pemikiran umat Islam selama ini dari

---

<sup>11</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

penafsiran yang ada di Al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat Islam. Kesenjangan gender dipengaruhi karena bermacam-macamnya penafsiran tentang pengertian gender itu sendiri. Seringkali gender dipersamakan dengan jenis kelamin dan pembagian tanggung jawab masing-masing telah dibuat sedemikian rupa dan berlalu dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, bahkan peran gender oleh masyarakat kemudian diyakin seolah-olah merupakan kodrat yang diberikan Allah SWT.

Sebagaimana yang terdapat pada ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”*.<sup>12</sup>

Pernyataan pada surat An-Nisa' ayat 34 diatas yang seolah-olah membedakan status antara laki-laki dan perempuan yang seharusnya tidak dipahami secara *literal normative* semata namun juga harus dipahami secara *historical contextual*. Kesadaran akan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan akan melahirkan

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2017)

kesadaran akan tanggung jawab dan tugas domestic dan public secara bersama-sama, yang pada tahap selanjutnya akan menciptakan dan menegakkan prinsip keadilan.<sup>13</sup>

Islam menempatkan posisi laki-laki sama dengan posisi perempuan. Pada hakikatnya Islam memberikan sejumlah hak, amal perbuatan, dan azab akan pelanggaran dari perbuatannya sama antara laki-laki dan perempuan.

Secara lebih jelas, hubungan antara laki-laki dan perempuan atau prinsip gender dijelaskan dalam Q.S Al-Ahzab ayat 35 sebagai berikut :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : *“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”*.<sup>14</sup>

Berdasarkan pada Q.S Al-Ahzab ayat 35 diatas bahwa Allah SWT. tidak membedakan jenis kelamin atau kodrat yang dibawanya sejak lahir.

Dari penjelasan yang ada di latar belakang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peneliti ingin meneliti tentang pengaruh ketimpangan gender terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Provinsi Lampung pada tahun 2015-

<sup>13</sup> Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Al-Jalalain*, (Surabaya: Pustaka Elba, 2015)

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2017)

2023 yang di lihat dari angka harapan hidup (AHH) dan rata-rata lama sekolah (RLS) sebagai indikatornya dalam perspektif ekonomi Islam.

### **C. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan, identifikasi masalah yang bisa diambil adalah sebagai berikut :

1. Masalah ketimpangan gender di Indonesia adalah ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan yang masih didominasi oleh laki-laki baik.
2. Ketimpangan gender yang tidak setara mengakibatkan perbandingan pada tingkat partisipasi angkata kerja (TPAK).
3. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki relatif lebih tinggi daripada perempuan.

### **D. Batasan Masalah**

Untuk lebih memperjelas kembali suatu permasalahan yang akan dibahas dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti agar bisa terfokuskan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini berkaitan dengan Ketimpangan Gender sebagai variabel X (*Independent*). Dimana Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebagai indikator dari ketimpangan gender pada tahun 2015-2023.
2. Penelitian ini berkaitan pula dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai variabel Y (*Dependent*) pada tahun 2015-2023.

### **E. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah Ketimpangan Gender dari segi Angka Harapan Hidup (AHH) berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Lampung Tahun 2015-2023 ?

2. Apakah Ketimpangan Gender dari segi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Lampung Tahun 2015-2023 ?
3. Apakah terdapat pengaruh Ketimpangan Gender dari segi Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) secara simultan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Lampung Tahun 2015-2023 ?
4. Bagaimana perspektif Ekonomi Islam tentang Ketimpangan Gender dari segi Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) secara simultan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Lampung ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang terdapat pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Ketimpangan Gender dari segi Angka Harapan Hidup (AHH) berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Lampung Tahun 2015-2023.
2. Untuk mengetahui Ketimpangan Gender dari segi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Lampung Tahun 2015-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh Ketimpangan Gender dari segi Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) secara simultan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Lampung Tahun 2015-2023.
4. Untuk mengetahui perspektif Ekonomi Islam tentang Ketimpangan Gender dari segi Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) secara simultan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Lampung.



## G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian pada penelitian ini yaitu :

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi untuk mahasiswa/i khususnya pada mahasiswa/i di Jurusan Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang ingin dan akan melakukan penelitian agar selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan untuk bahan tambahan pengetahuan serta informasi yang bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkan dan sebagai referensi yang berkaitan dengan ketimpangan gender dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Provinsi Lampung.

### 2. Secara Praktis

Bagi peneliti sendiri dan masyarakat yang ada di Provinsi Lampung diharapkan penelitian ini agar dapat membantu menambah wawasan serta pengetahuan dalam ketimpangan gender dimana tidak terdapat pembeda antara laki-laki dan perempuan dalam mencari serta berpartisipasi didalam dunia kerja di Provinsi Lampung.

## H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa referensi dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya atau penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai gambaran untuk mempermudah penulis dalam proses penelitian. Penulis melakukan penelusuran terkait penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema **“Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Lampung Tahun 2015-2023 dalam Perspektif Ekonomi Islam”** yang akan dibahas dalam penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, antara lain yakni :

**Tabel 1.2 Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

| No | Peneliti  | Judul  | Metodelogi  | Hasil   |
|----|---|--|-------------|---|
| 1  | Zulfa Miftha'ul Hidayah dan Farida Rahmawati (2020) <sup>15</sup> | Menelusuri Relasi Indikator Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi | Kuantitatif | Hasil temuan menunjukkan bahwa penurunan ketimpangan gender dalam aspek kesehatan dan pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.       |
| 2  | Agnes Vera Yanti Sitorus (2016) <sup>16</sup>                     | Dampak Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia                | Kuantitatif | Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan gender di Indonesia. Hasil estimasi model pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan analisis regresi data panel menunjukkan |

<sup>15</sup>Zulfa Miftha'ul Hidayah dan Farida Rahmawati, *Menelusuri Relasi Indikator Indeks Pembangunan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Vol. 07 No. 01 Juni 2020.

<sup>16</sup> Agnes Vera Yanti Sitorus, *Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Sosio Informa Vol. 02 No. 01 April 2016.

|   |                                |  |            |  |
|---|--------------------------------|--|------------|--|
|   |                                |  |            | <p>bahwa indeks ketimpangan gender yang diproksi dengan rasio IPG/IPM berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi tidak hanya didorong oleh keberhasilan peningkatan kapabilitas dasar penduduk laki-laki tetapi juga penduduk perempuan.</p> |
| 3 | Mutmainah (2019) <sup>17</sup> | Kesenjangan Gender di Tinjau dari Perspektif Islam | Kualitatif | <p>Dasar normatif penataan kehidupan gender secara tradisional memang belum selesai, namun justru hal ini akan dihidupkan kembali dengan jalan yang terus-menerus mengaktualkannya kembali sesuai dengan</p>   |

<sup>17</sup>Mutmainah, *Kesenjangan Gender di Tinjau dari Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini UIN Sunan Kalijaga Vol. 05 No. 01 Maret 2019.

|   |   |  |             |  |
|---|---|--|-------------|--|
|   |   |  |             | pandangan yang baru.   |
| 4 | Yeni Nuraeni dan Ivan Lilin Suryono (2021) <sup>18</sup>    | Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia | Kualitatif  | Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih terjadi di Indonesia, namun seiring waktu ketimpangannya semakin mengecil, artinya kesempatan pada perempuan dan laki-laki hampir sama. Namun pada peningkatannya masih terdapat hambatan terhadap kesetaraan gender di dunia kerja. |
| 5 | Ardiyana Yunika Infarizki, Gentur Jalunggono, dan Lorentino | Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Produk Domestik        | Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio rata-rata lama sekolah (RLS), rasio angka harapan hidup (AHH), dan  |

---

<sup>18</sup>Yeni Nuraeni dan Ivan Lilin Suryono, *Analisis Kesetaraan gender dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 02 No. 01 Juni 2021.

|  |                                 |   |  |   |
|--|---------------------------------|---|--|---|
|  | Togar Laut (2018) <sup>19</sup> | Regional Bruto (PDRB) di Jawa Tengah Tahun 2010-2018 (Studi Penelitian di Wilayah Keresidenan Kedu) |  | indeks pemberdayaan gender berpengaruh secara signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Wilayah Keresidenan Kedu Provinsi Jawa Tengah. |
|--|---------------------------------|---|--|---|

Berdasarkan penelitian terdahulu seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwa secara langsung dan tidak langsung antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya tentu saja dan sudah pasti memiliki beberapa perbedaan. Dan dari kelima penelitian terdahulu diatas lebih memperhatikan ketimpangan atau kesetaraan gender dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) atau ketenagakerjaan baik dari bidang pendidikan dan kesehatan. Serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh mengenai penelitian ini, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

---

<sup>19</sup>Ardiyana Yunika Infarizki, *Gentur Jalunggono, dan Lorentino Togar Laut, Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Tengah Tahun 2010 – 2018 (Studi Penelitian di Wilayah Keresidenan Kedu)*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Magelang 2018.



## BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

Bab ini berisikan tentang teori ketimpangan gender, teori rata-rata lama sekolah, teori angka harapan hidup, teori tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan ekonomi Islam serta ketimpangan gender dalam perspektif Islam dan tenaga kerja dalam perspektif Islam. Kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian, uji validitas dan realibilitas data, uji prasarat analisis, dan uji hipotesis.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang deskripsi data, dan pembahasan hasil penelitian dan analisis.

## BAB V PENUTUP

Bab ini ialah bagian akhir dari penelitian ini, bagian penutup ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang sudah di uraikan pada bab-bab sebelumnya.

## DAFTAR RUJUKAN

Pada bagian ini berisikan tentang rujukan-rujukan yang sudah dipakai penulis dari berbagai sumber seperti, buku, dan jurnal.

## LAMPIRAN

Pada bagian ini berisikan tentang dokumen-dokumen pendukung yang sudah dilakukan selama proses penelitian, seperti data indeks pembangunan gender (IPG), data tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), data rata-rata lama sekolah (RLS), data angka harapan hidup (AHH), dan data pendukung lainnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

#### A. Teori Yang Digunakan

##### 1. Gender

Istilah gender banyak digunakan dalam pembahasan di bidang sosial dan humaniora, terutama yang terkait dengan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun pada dasarnya netral, istilah ini seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang negatif, terutama yang berkaitan dengan posisi perempuan dan laki-laki, di mana perempuan “dipandang” tidak sejajar dengan laki-laki.<sup>20</sup>

Istilah “gender” pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial orang yang juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender ini adalah Ann Oakley. Sebagaimana Stoller Oakley mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia.<sup>21</sup>

Menurut Muhtar, berpendapat bahwa gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan pada jenis kelamin. Sementara menurut Fakih, mendefinisikan bahwa gender sebagai suatu sifat yang sudah melekat pada kaum laki-laki maupun pada kaum perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Istilah gender juga dapat dibedakan dalam istilah seks. Ahli Sosiologi Inggris Saptari dan Halzner, yang mula-mula memberikan perbedaan dari dua istilah tersebut.

Kata “Gender” sering diartikan sebagai kelompok laki-laki, perempuan, dan perbedaan jenis kelamin. Gender adalah suatu sifat yang dapat dijadikan dasar untuk mengidentifikasi

---

<sup>20</sup>Prof. Dr. Ibnu Hadjar, M.Ed, *Ketimpangan Gender dalam Seleksi Calon Mahasiswa di Perguruan Tinggi*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2019), h. 25

<sup>21</sup> Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. 3

perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya. Sejarah pada perbedaan gender antara seorang laki-laki dan perempuan ini terjadi melalui proses yang sangat panjang dan sudah dibentuk oleh beberapa sebab. Dengan melalui proses ini, perbedaan gender akhirnya sering dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati atau seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi.<sup>22</sup>

Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan.<sup>23</sup> Dalam memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin “merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu”.<sup>24</sup>

Konsep Gender yang dikembangkan Hubies melalui Anshori dkk, dalam meliputi :

- a. Gender *differrence*, yaitu perbedaan-perbedaan karakter, perilaku, harapan yang dirumuskan untuk tiap-tiap orang menurut jenis kelamin.
- b. Gender *gap*, yaitu perbedaan dalam hubungan berpolitik dan bersikap antara laki-laki dan perempuan.
- c. *Genderization*, yaitu acuan konsep penempatan jenis kelamin pada identitas diri dan pandangan orang lain.
- d. Gender *identity*, yaitu perilaku yang seharusnya dimiliki seseorang menurut jenis kelaminnya.

---

<sup>22</sup>Ardiyana Yunika Infarizki, *Gentur Jalunggono, dan Lorentino Togar Laut, Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Tengah Tahun 2010 – 2018 (Studi Penelitian di Wilayah Keresidenan Kedu)*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Magelang 2018.

<sup>23</sup>Agnes Vera Yanti Sitorus, *Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Sosio Informa Vol. 02 No. 01 April 2016.

<sup>24</sup>DR. Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. 7

- e. *Gender role*, yaitu peran perempuan dan peran laki-laki yang diterapkan dalam bentuk nyata menurut budaya setempat yang dianut.<sup>25</sup>

Salah satu indikasi terciptanya kesetaraan Gender adalah kontribusi yang sama dalam sektor publik antara laki-laki dan maupun perempuan. Budaya patriarki yang tumbuh di Indonesia mengidentikkan sektor publik sebagai ranah sebagaimana hanya kaum laki-laki yang memiliki peran dan tanggung jawab lebih besar ketimbang kaum perempuan. Sementara itu, peran perempuan dibatasi yang dimana perannya lebih banyak pada pekerjaan di sektor domestik rumah tangga. Seiring berjalannya waktu, peran perempuan di sektor publik menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Perbaikan beberapa indikator ketenagakerjaan perempuan menunjukkan bahwa sektor publik bukan lagi ranah yang hanya ditujukan untuk laki-laki tetapi juga memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam sektor publik. Mengukur capaian pemberdayaan Gender di Indonesia digunakan sebuah indeks komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari *Gender Empowerment Measure* (GEM) yang dihitung oleh UNDP. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, namun IDG berbeda dengan IPG. Adapun yang dimaksud dengan IPG yaitu digunakan untuk mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminis*, (Yogyakarta: Garudhawaca), h. 4

<sup>26</sup> Yohana Susana Yambise, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018), h. 42

Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami dan disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social constructions*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati. Dalam konteks tersebut, gender harus dibedakan dari jenis kelamin (seks). Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, misalnya perempuan dikenal lembut dan cantik. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa gender adalah interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa gender pada hakikatnya lebih menekankan aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non biologis lainnya. Hal ini berarti bahwa gender lebih menekankan aspek maskulinitas atau feminitas seseorang dalam budaya tertentu. Dengan demikian, perbedaan gender pada dasarnya merupakan konstruksi yang dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dilegitimasi secara sosial dan budaya. Pada gilirannya, perbedaan gender dianggap kodrati hingga melahirkan ketidakseimbangan perlakuan jenis kelamin.

Dalam hal ini juga dapat disimpulkan bahwa konsep gender yang dimaksud adalah bahwa gender merupakan konstruksi sosial dan budaya yang melahirkan sifat yang melekat bagi laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada aspek sosial, budaya, politik, dan agama sebagai manifestasi kesadaran sistem kognitif yang tercipta dari suatu kelompok masyarakat dalam memahami lingkungannya.

## **2. Ketimpangan Gender**

Ketimpangan gender adalah kondisi dimana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di berbagai sektor kehidupan banyak indikator menunjukkan perempuan

tertinggal dibandingkan laki-laki dalam hal memperoleh kesempatan, peluang serta hasil-hasil pembangunan.<sup>27</sup>

Menurut Eitzen, ada 2 penyebab munculnya ketimpangan gender, yaitu :

- a. Pandangan Teori Materialis. Teori materialis menjelaskan ketimpangan gender sebagai sebuah outcome tentang bagaimana perempuan dan laki-laki diikat terhadap kepada ekonomi masyarakat. Maksudnya adalah perempuan dihargai dengan upah yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Hal ini dikarenakan perempuan : (1) kalah kuat secara fisik dibanding laki-laki, dan (2) perempuan secara fisik memiliki tugas-tugas sosial yang lebih banyak dibanding laki-laki. Teori ini menekankan kontrol dan distribusi sumber daya yang bernilai sebagai fakta yang krusial dalam menghasilkan stratifikasi.
- b. Perbedaan antara pekerjaan domestik dan publik. Perbedaan ruang lingkup publik dan domestik dari aktivitas menyebabkan perempuan dibatasi gerakannya. Peran reproduksi perempuan dan tanggung jawabnya pada pekerjaan domestik membuatnya terbatas untuk mengakses sumber daya yang bernilai tinggi.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia membagi beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketimpangan gender, antara lain :

- a. Pelabelan sifat-sifat tertentu (*stereotype*). Perempuan cenderung mendapat stereotipe yang merendahkan seperti: perempuan adalah makhluk yang lemah, emosional, cengeng, tidak tahan banting.
- b. Pemiskinan ekonomi terhadap perempuan. Pemiskinan ekonomi banyak dialami oleh perempuan desa yang berprofesi sebagai petani, hal ini berawal dari asumsi bahwa petani identik dengan profesi laki-

---

<sup>27</sup> m-edukasi.kemdikbud.go.id

<sup>28</sup> Widjajanti M. Santoso, *Penelitian dan Pengarusutamaan Gender: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: LIPI Press, 2016), h. 6



- laki. Di luar pekerjaan petani, pekerjaan perempuan dianggap lebih rendah, sehingga berimbas pada perbedaan gaji yang diterima perempuan dan laki-laki.
- c. Subordinasi pada salah satu jenis kelamin yaitu perlakuan menomorduakan perempuan. Pemimpin masyarakat hanya pantas dipegang oleh lelaki, perempuan hanya dapat menjadi pemimpin hanya sebatas pada kaumnya (sesama perempuan).
  - d. Tindak kekerasan (*violence*) terhadap perempuan. Perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah secara fisik sehingga seringkali mengalami kekerasan dalam bentuk: pemukulan, pemerkosaan dan pelecehan seksual.
  - e. Budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Budaya patriarki menganggap kaum laki-laki secara kodrati memiliki superioritas atas kaum perempuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan bernegara.<sup>29</sup>

Ketimpangan gender masih sering terjadi pada seluruh aspek kehidupan di Indonesia, masih terdapat gap capaian manfaat hasil pembangunan pada perempuan terhadap laki-laki yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam ketimpangan gender era dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai wilayah/provinsi.<sup>30</sup>

Ketimpangan gender juga masih sering terjadi dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ketenagakerjaan ialah :

- a. Ketimpangan Gender di Bidang Pendidikan  
Indikator bidang pendidikan dinilai dari angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah. Menurut Badan Pusat Statistik, angka melek huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang

<sup>29</sup> m-edukasi.kemdikbud.go.id

<sup>30</sup> Agnes Vera Yanti Sitorus, *Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Sosio Informa Vol. 02 No. 01 April 2016.

mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca atau ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal.<sup>31</sup>

Menurut Suleeman, dalam Rahmi dan Habibullah, pada ketimpangan gender di dalam bidang pendidikan adalah suatu perbedaan hak dan kewajiban di antara perempuan dan laki-laki dalam menempuh pendidikan yang formal. Ketimpangan gender di dalam bidang pendidikan dapat merugikan perempuan dimana perempuan cenderung untuk putus sekolah ketika keuangan keluarga tidak lagi mencukupi. Pendidikan yang rendah pada perempuan dapat menyebabkan mereka terkonsentrasi pada pekerjaan informal dengan upah yang rendah.<sup>32</sup>

Ketimpangan gender yang terjadi di bidang pendidikan dikarenakan adanya ketidaksetaraan dalam hal latar belakang pendidikan yang belum setara antara laki-laki dan perempuan sehingga dapat mempengaruhi terhadap faktor lainnya seperti, lapangan pekerjaan, peran di masyarakat, jabatan, hingga pada masalah menyuarakan pendapat. Dikarenakan adanya ketidaksetaraan gender pada latar belakang pendidikan maka dapat mengakibatkan juga rendahnya tingkat pendidikan perempuan. Sehingga, perempuan belum mempunyai peran yang besar dalam pembangunan. Menurut Suryadi, dengan ditingkatkannya taraf pendidikan dan dihilangkannya diskriminasi gender di bidang pendidikan dapat

---

<sup>31</sup> Rasmianti Yasin, St. Haerani, dan Mardiana Ethrawaty Fachry, *Dampak Sosial dan Ekonomi Reklamasi Pantai Terhadap Indeks Pembangunan Gender Masyarakat Pesisir di Kota Makassar*, Jurnal Analisis Vol. 07 No. 01, 2018.

<sup>32</sup> Ervani Faradillah Rahman dan Nunung Nurwati, *Ketidaksetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan serta Hubungannya dengan Perkawinan Usia Muda Pada Perempuan*, Jurnal Umum Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad, 2020.

memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan lebih dalam pembangunan serta menjadi penentu kebijakan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik.<sup>33</sup>

Nursyam dan Harum, menjelaskan hal-hal utama yang dapat menjadi penyebab terjadinya ketimpangan gender di dalam bidang pendidikan, antara lain :

- 1.) Adanya pandangan secara agama bahwa kaum perempuan merupakan bagian dari kaum laki-laki. Hal tersebut menjelaskan bahwa laki-laki dapat dikatakan sebagai pihak yang superior dan perempuan dianggap sebagai kaum inferior yang berpijak pada kaum laki-laki.
- 2.) Dilihat dari pandangan sosiologis bahwa seorang perempuan dalam segala hal ditempatkan di rumah sehingga pernyataan tersebut tidak mendukung perempuan untuk berpendidikan tinggi.
- 3.) Pandangan psikologis melihat perempuan sebagai istri yang mendampingi suami tanpa membutuhkan pendidikan yang tinggi.
- 4.) Pandangan budaya masyarakat yang menganut paham bahwa perempuan bukanlah kaum yang memerlukan pendidikan yang lebih bahkan dianggap sebagai pelengkap laki-laki saja.
- 5.) Menurut pandangan ekonomi, perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan karena adanya keterbatasan ekonomi. Perempuan akan segera dinikahkan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Idham Hariadinata, *Ketimpangan Gender dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan*, Disertasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

<sup>34</sup> Ervani Faradillah Rahman dan Nunung Nurwati, Ketidaksetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan serta Hubungannya dengan Perkawinan Usia Muda Pada Perempuan, *Jurnal Umum Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad*, 2020.

“pendidikan bagi kaum perempuan penting” Statement tersebut dijelaskan dalam Todaro dan Smith. Statement tersebut didasarkan dengan bukti empiris yang cukup kuat, bahwasanya diskriminasi di dalam bidang pendidikan khususnya bagi kaum perempuan akan menghambat pembangunan ekonomi dan juga akan memperburuk ketimpangan pada sosial. Ada empat alasan yang menjelaskan keuntungan secara ekonomi jika memperkecil gap ketimpangan gender di dalam bidang pendidikan dengan dilakukannya kesempatan pendidikan yang luas bagi kaum perempuan, yaitu:

- 1.) Tingkat pengembalian (*rate of return*) dari pendidikan kaum perempuan lebih tinggi daripada tingkat pengembalian pendidikan laki-laki di kebanyakan negara berkembang.
- 2.) Dengan ditingkatkan pendidikan bagi kaum perempuan dapat menaikkan partisipasi tenaga kerja, lambatnya pernikahan, rendahnya tingkat fertilitas, kesehatan dan gizi anak-anak yang lebih baik bukan hanya menaikkan produktivitas kaum perempuan di sektor pabrik ataupun pertanian.
- 3.) Munculnya dampak pengganda (*multiplier effect*) dikarenakan adanya pengaruh kesehatan dan gizi anak-anak yang lebih baik serta ibu yang lebih terdidik terhadap kualitas anak bangsa yang akan datang.
- 4.) Dengan adanya perbaikan yang signifikan bagi peran dan status perempuan melalui pendidikan akan memberikan dampak untuk memutuskan lingkaran setan kemiskinan serta pendidikan yang tidak memadai. Dikarenakan, perempuan menjadi beban terbesar bagi kemiskinan dan kelangkaan di lingkungan masyarakat negara berkembang.

Sehingga dari penjelasan diatas, ketimpangan gender pada sektor pendidikan telah menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap ketimpangan gender.<sup>35</sup>

b. Ketimpangan Gender di Bidang Kesehatan

Indikator di dalam bidang kesehatan dinilai dari angka harapan hidup masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik dan Bappenas, angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.<sup>36</sup>

Menurut Departemen Kesehatan, laki-laki dan perempuan dalam hal sistem pelayanan di bidang kesehatan memiliki kecenderungan diperlakukan secara berbeda. Perbedaan di bidang kesehatan akan mengakibatkan perbedaan yang terjadi di akses dan kualitas pelayanan yang diterima bagi perempuan dan laki-laki. Ketimpangan gender dalam bidang kesehatan adalah masalah kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam hal akses, peran atau partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh mereka dalam pembangunan kesehatan. Kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam upaya atau pelayanan kesehatan secara langsung menyebabkan ketidaksetaraan terhadap status kesehatan perempuan dan laki-laki, sehingga kesenjangan tersebut harus menjadi perhatian dalam menyusun kebijakan atau program sehingga kebijakan atau program ini bisa lebih terfokus, efisien dan efektif dalam mencapai sasaran. Oleh karena itu, isu

---

<sup>35</sup> Idham Hariadinata, *Ketimpangan Gender dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan*, Disertasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

<sup>36</sup> Rasmiati Yasin, St. Haerani, dan Mardiana Ethrawaty Fachry, *Dampak Sosial dan Ekonomi Reklamasi Pantai Terhadap Indeks Pembangunan Gender Masyarakat Pesisir di Kota Makassar*, Jurnal Analisis Vol. 07 No. 01, 2018.

kesehatan tidak boleh hanya dilihat pada masalah *service delivery* (penyediaan layanan) saja, tetapi juga perlu melihat pada hubungan sosial budaya yang menyebabkan perbedaan status dan peran perempuan dan laki-laki dan relasi antara keduanya di masyarakat.<sup>37</sup>

Dalam Gorman dan Read, mereka menjelaskan berbagai penyebab ketimpangan gender dalam mortalitas. Penyebab ketimpangan gender dalam mortalitas dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori yang terdiri dari biologis, struktur sosial dan perilaku.

- 1.) Kategori yang pertama yaitu biologis, dalam kategori ini dijelaskan bahwasanya perempuan mempunyai sistem imunitas yang lebih baik karena testosteron menyebabkan immunosupresi.
- 2.) Kategori yang kedua yaitu struktur sosial, dalam kategori tersebut dijelaskan bahwa adanya peningkatan perawatan prenatal dan kebidanan sehingga terjadinya penurunan angka kematian ibu.
- 3.) Kategori ketiga yang perilaku, perilaku perempuan sangatlah baik jika dibandingkan perilaku laki-laki. Karena, perilaku laki-laki lebih tinggi dalam hal mengkonsumsi alkohol dan rokok serta sering mengalami cedera yang disengaja maupun tidak disengaja, pembunuhan dan bunuh diri.<sup>38</sup>

- c. Ketimpangan Gender di Bidang Ketenagakerjaan
- Ketimpangan gender dalam ketenagakerjaan akan berdampak pada ekonomi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Klasen dan Lamanna, memperlihatkan bahwa ketimpangan dalam kesempatan kerja akan

---

<sup>37</sup> Kemkes.go.id

<sup>38</sup> Idham Hariadinata, *Ketimpangan Gender dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan*, Disertasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syarif Hidayatullah, 2019.



menghambat pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang hilang akibat ketimpangan gender dalam ketenagakerjaan sekitar 4 kali lebih besar dibandingkan ketimpangan gender dalam pendidikan.

Persoalan ketimpangan gender di dalam bidang ketenagakerjaan tidak hanya sekedar terlibat atau tidak terlibatnya perempuan dalam pasar tenaga kerja, tetapi juga dilihat ketika perempuan telah memasuki dunia kerja. Faktanya, upah tenaga kerja perempuan cenderung relatif lebih rendah dari pada laki-laki meskipun sama-sama dalam status informal atau formal.<sup>39</sup>

Menurut Khotimah, menyatakan bahwasanya struktur angkatan kerja perempuan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga masih banyaknya perempuan yang bekerja di sektor informal. Sektor informal merupakan pekerjaan yang tidak perlu kualitas pengetahuan dan keterampilan canggih atau spesifik namun perempuan yang bekerja di sektor informal kurang diberikannya jaminan perlindungan secara hukum, kurang memadai jaminan kesejahteraan, kondisi kerja yang memprihatinkan, dan rendahnya pendapatan pada sektor informal.

Terdapat dua fenomena yang menunjukkan adanya diskriminasi gender dalam pasar kerja, yaitu penghasilan rata-rata perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki serta sudah terpilahnya pekerjaan berdasarkan gender bagi perempuan dan laki-laki. Hal ini mencerminkan sejumlah kecenderungan :

- 1.) Investasi modal insani lebih banyak ditanamkan bagi anak laki-laki ketimbang anak perempuan.

---

<sup>39</sup> Ema Tusianti, *Ketimpangan Gender dalam Penyerapan Tenaga Kerja Formal di Indonesia*, Jurnal Kongres ISEI ke XX Bandung, 2018.

- 2.) Para pengusaha yang memiliki preferensi diskriminatif tentang siapa yang dikontrak dan dibayar mahal.
- 3.) Pelecehan seksual di tempat kerja yang membuat kondisi kerja tidak nyaman dan berbahaya serta menurunkan moral dan juga produktivitas pekerja.
- 4.) Peran dominan perempuan dalam membesarkan anak dan mengelola rumah tangga.
- 5.) Norma-norma sosial dan agama yang membatasi kemampuan perempuan untuk bekerja di luar rumah dan untuk memilih jenis pekerjaan.
- 6.) Undang-undang dan peraturan perburuhan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan terhadap potensi bahaya pekerjaan yang justru telah menjauhkan mereka dari pekerjaan-pekerjaan tertentu.<sup>40</sup>

### 3. Ketimpangan Gender dalam Perspektif Islam

Kedatangan ajaran Islam membawa angin segar bagi kaum perempuan, ajaran Islam menjadi rahmat bagi kaum perempuan karena Islam mengajarkan persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang hanya dapat terlihat dari tinggi rendahnya nilai pengabdian dan ketakwaan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>41</sup> Hal ini dapat dipahami lebih lanjut pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

---

<sup>40</sup> Idham Hariadinata, *Ketimpangan Gender dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan*, Disertasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

<sup>41</sup> Hasnani Siri, *Gender dalam Perspektif Islam*, Jurnal AI – Maiyyah Vol. 07 No. 02, 2014.

Artinya : “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*”<sup>42</sup>

Kedudukan perempuan dalam ajaran Islam tidak seperti yang dipraktekkan oleh sebagian masyarakat. Ajaran Islam pada hakekatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan.<sup>43</sup> Oleh karena itu, mulai muncul gerakan-gerakan yang menginginkan dan menuntut kesetaraan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

#### **4. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)**

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mengindikasikan makin tingginya pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani.<sup>44</sup> Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang telah diselesaikan oleh penduduk pada seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka ini juga bisa menggambarkan kualitas pendidikan penduduk dalam sebuah wilayah. Angka ini dihitung dengan menggunakan tiga variabel simultan yaitu variabel partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan ijazah terakhir yang dimiliki. Penduduk yang di hitung dalam rata-rata lama sekolah ini adalah penduduk usia 15 tahun ke atas.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al – Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur’an, 2017)

<sup>43</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 2004), h. 269

<sup>44</sup> Widiatma Nugroho dan Evi Yulia Purwanti, SE., Msi, *Analisis Pengaruh PDRB, Agrishare, Rata – Rata Lama Sekolah, dan Angka Melek Huruf Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia*, Jurnal Umum Universitas Padjajaran, 2015.

<sup>45</sup> Abdul Hadi, *Pengaruh Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Terhadap Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan, 2019.

Untuk memperoleh pekerjaan yang ditawarkan di sektor modern didasarkan kepada tingkat pendidikan seseorang dan tingkat penghasilan yang dimiliki selama hidup berkorelasi positif terhadap tingkat pendidikannya. Tingkat penghasilan ini sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh pendidikan. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator tingkat pendidikan di suatu daerah. Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (*human capital*) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).<sup>46</sup>

Menurut Mankiw, suatu negara yang memberikan perhatian lebih kepada pendidikan terhadap masyarakatnya ceteris paribus akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik daripada tidak melakukannya. Dengan kata lain, investasi terhadap sumber daya manusia melalui kemajuan pendidikan akan menghasilkan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Melliana & Zain, melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan indeks kualitas sumber daya manusia dengan penemuan yakni faktor pendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah pembangunan yang terencana seperti anggaran untuk pendidikan, dengan peningkatan angka partisipasi sekolah. Handayani, juga memperlihatkan bahwa rata-rata lama sekolah mempercepat pertumbuhan ekonomi.<sup>47</sup>

## **5. Angka Harapan Hidup (AHH)**

Angka Harapan Hidup (AHH) dapat mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat dan mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan pada bidang kesehatan. Semakin tinggi angka harapan hidup maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik dan hal ini didukung oleh keberhasilan dalam pembangunan pada bidang kesehatan. Sebaliknya, pembangunan

---

<sup>46</sup> Widiatma Nugroho, *Analisis Pengaruh PDRB, Agrishare, Rata – Rata Lama Sekolah, dan Angka Melek Huruf Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia*, Jurnal Umum Universitas Padjajaran, 2015.

<sup>47</sup> Nurul Huda dan Kurniyati Indahsari, *Pengaruh Rata – Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2018*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 02 No.01, 2021.

bidang kesehatan yang kurang berhasil berdampak pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat sehingga angka harapan hidup relatif lebih rendah.<sup>48</sup> Angka Harapan Hidup (AHH), dijadikan indikator dalam mengukur kesehatan suatu individu di suatu daerah.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Sementara itu untuk menghitung indeks harapan hidup digunakan nilai maksimum harapan hidup sesuai standar UNDP, dimana angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah 25 tahun (standar UNDP).<sup>49</sup>

Penelitian mengenai Angka Harapan Hidup sangat diperlukan, mengingat Angka Harapan Hidup merupakan indikator penting pembangunan kesehatan dan ekonomi. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu komponen dalam pembentuk Indeks Pembangunan Manusia sekaligus sebagai indikator dampak peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Angka Harapan Hidup juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat sangatlah penting untuk melihat Angka Harapan Hidup. Dibeberapa negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis

---

<sup>48</sup> Herti Maryani dan Lusi Kristiana, *Pemodelan Angka Harapan Hidup (AHH) Laki – Laki dan Perempuan di Indonesia Tahun 2016*, Jurnal Penelitian Sistem Kesehatan Vol. 21 No. 02, 2018.

<sup>49</sup> Merna Kumalasari, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata – Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah*, Jurnal Umum Universitas Diponegoro, 2015.

mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi.<sup>50</sup>

## 6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Menurut *International Labour Organization (ILO)*, tenaga kerja merupakan penduduk yang sudah memaski usia kerja yaitu 15 tahun keatas. Adapun seluruh penduduk yang ada pada suatu negara yang sudah dapat menghasilkan atau memproduksi barang dan jasa jika terdapat permintaan terhadap tenaga mereka, dan juga apabila mereka ingin berpartisipasi dalam aktivitas tersebut juga termasuk kedalam golongan tenaga kerja. Menurut Rusli angkatan kerja merupakan *economically active population*, mereka adalah pencari nafkah atau penerima pendapatan atau yang berusaha kearah itu.<sup>51</sup> Secara demografis besarnya angkatan kerja tergantung dari tingkat partisipasi angkatan kerja (*labor force participation rate*) yaitu berapa persen dari tenagakerja yang berpartisipasi menjadi angkatan kerja.<sup>52</sup>

Menurut Lembaga Demografi FEUI, pertumbuhan angkatan kerja diakibatkan tren perubahan demografi dimasa lalu yang merupakan respon dari kondisi perekonomian pada masanya. Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan cerminan dari total angkatan kerja yang berada pada kelompok umur tertentu dengan membandingkan jumlah angkatan kerja total atau pada kelompok umur tertentu dengan jumlah tenaga kerja.<sup>53</sup>

Secara keseluruhan dari jumlah penduduk dalam usia kerja yang mempunyai pekerjaan dan yang tidak mempunyai pekerjaan, tapi secara aktif atau pasif mencari pekerjaan, disebut angkatan kerja. Dengan kata lain juga dapat dikatakan, bahwa angkatan kerja ialah bagian penduduk yang mampu dan bersedia

---

<sup>50</sup> Herti Maryani dan Lusi Kristiana, *Pemodelan Angka Harapan Hidup (AHH) Laki-Laki dan Perempuan di Indonesia Tahun 2016*, Jurnal Penelitian Sistem Kesehatan Vol. 21 No. 02, 2018.

<sup>51</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), h. 116

<sup>52</sup> Bagus Takwin, Lucky Winara, dan Sahat K. Panggabean, *Angkatan Kerja dalam Perspektif Demografi*, (Jakarta: Lembaga Demografi FEB UI, 2004), h. 206

<sup>53</sup> Bagus Takwin, Lucky Winara, dan Sahat K. Panggabean, *Angkatan Kerja dalam Perspektif Demografi*, (Jakarta: Lembaga Demografi FEB UI, 2004), h. 198



melakukan pekerjaan. Kata “mampu” di sini menunjuk kepada tiga hal. Pertama, mampu fisik, yaitu sudah cukup umur, jasmani cukup kuat, dan tidak mempunyai cacat badan yang menghilangkan kemampuannya untuk melakukan pekerjaan. Kedua, mampu mental, mempunyai mental yang sehat, dan tidak memiliki kelainan atau penyakit psikiatri yang tidak memungkinkannya untuk melakukan pekerjaan yang normal. Ketiga, mampu yuridis, yaitu tidak kehilangan kebebasan untuk memiliki dan melakukan pekerjaan. Sedangkan kata “bersedia” berarti orang yang bersangkutan dapat secara aktif, maupun secara pasif atas kemauannya sendiri mencari pekerjaan. Di sini tidak ada unsur paksaan dan yang ada ialah kebebasan pribadi untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya.<sup>54</sup>

Menurut Sadono Sukirno, angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Angkatan Kerja dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yakni :

- a. Menganggur (*Unemployed*), yaitu mereka yang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini sering disebut juga pengangguran terbuka (*open employment*). Berdasarkan definisi ini, tingkat pengangguran di Indonesia umumnya relatif rendah, yaitu 3%-5% per tahun.
- b. Setengah menganggur (*Underemployed*), yaitu mereka yang bekerja, tetapi belum dimanfaatkan secara penuh. Artinya jam kerja mereka dalam seminggu kurang dari 35 jam. Berdasarkan definisi ini tingkat pengangguran di Indonesia relatif tinggi, karena angkanya berkisar 35% per tahun.
- c. Bekerja penuh (*Employed*), yaitu orang-orang yang bekerja penuh atau jasa kerjanya mencapai 35 jam per minggu.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Suroto, *Strategi Pembangunan Dan Perencanaan Kesempatan Kerja*, (Yogyakarta: Gadjah Mad.a University Press, 1983), h. 25

<sup>55</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h 18

Istilah partisipasi angkatan kerja berbeda dari istilah partisipasi kerja. Partisipasi angkatan kerja berarti keikutsertaan dalam atau menjadi angkatan kerja. Jadi, tingkat partisipasi angkatan kerja (*labor force participation rate*) menunjuk kepada persentase jumlah penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja. Sebaliknya partisipasi angkatan kerja berarti keikutsertaan dalam atau mempunyai pekerjaan. Jadi, tingkat partisipasi angkatan kerja menunjuk kepada persentase jumlah angkatan kerja yang mempunyai pekerjaan (*employment rate*).<sup>56</sup>

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja, yakni :

- a. Jumlah Penduduk yang Masih Bersekolah  
Semakin besar jumlah penduduk yang bersekolah, semakin kecil jumlah angkatan kerja dan semakin kecil TPAK. Jumlah penduduk yang bersekolah dipengaruhi oleh tingkatan penyediaan fasilitas pendidikan dan kondisi serta tingkat penghasilan keluarga.
- b. Jumlah penduduk yang Mengurus Rumah Tangga  
Semakin banyak anggota dalam tiap-tiap keluarga yang mengurus rumah tangga semakin kecil TPAK.
- c. Tingkat Penghasilan Keluarga  
Keluarga berpenghasilan relatif terhadap biaya hidup cenderung memperkecil jumlah anggota keluarga untuk bekerja, jadi TPAK relatif rendah. Sebaliknya keluarga yang biaya hidupnya sangat besar relatif kepada penghasilannya cenderung untuk memperbanyak jumlah anggota keluarga untuk bekerja, jadi TPAK relatif meningkat.
- d. Struktur Umur  
Penduduk yang berumur muda umumnya tidak mempunyai tanggung jawab yang begitu besar sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Bahkan mereka umumnya bersekolah. Penduduk dalam

---

<sup>56</sup> Suroto, *Strategi Pembangunan Dan Perencanaan Kesempatan Kerja*, (Yogyakarta: Gadjah Mad.a University Press, 1983), h. 31

kelompok umur 25-55 tahun, terutama laki-laki, umumnya dituntut untuk mencari nafkah. Oleh sebab itu TPAK relatif besar. Selanjutnya penduduk di atas umur 55 tahun sudah mulai menurun kemampuan untuk bekerja, dan TPAK umumnya rendah.

e. Tingkat Upah

Semakin tinggi tingkat upah dalam masyarakat, semakin tinggi anggota keluarga yang tertarik masuk pasar kerja, atau dengan kata lain semakin tinggi TPAK.

f. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin banyak waktu yang disediakan untuk bekerja. Terutama bagi para wanita, dengan semakin tinggi tingkat pendidikan, kecenderungan untuk bekerja semakin besar. Keadaan ini menunjukkan bahwa TPAK semakin besar pula.

g. Kegiatan perekonomian

Program pembangunan disatu pihak menuntut keterlibatan lebih banyak orang dan dilain pihak program pembangunan menumbuhkan harapan – harapan baru. Harapan untuk dapat ikut menikmati hasil pembangunan tersebut dinyatakan dalam peningkatan partisipasi kerja. Semakin bertambahnya kegiatan perekonomian semakin besar TPAK.<sup>57</sup>

## **7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dalam Perspektif Islam**

Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT. guna menyempurnakan agama sebelumnya. Dengan Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman utama, Islam mengatur semuanya, termasuk dalam urusan bekerja. Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya agar berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak dibenarkan seorang muslim

---

<sup>57</sup> Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2009), h. 76

berpangku tangan saja atau berdoa mengharapkan rezeki datang dari langit tanpa mengiringinya dalam usaha. Namun, demikian tidak dibenarkan pula terlalu dan tidak mengandalkan kemampuan sehingga melupakan pertolongan Allah SWT. dan tidak mau berdoa kepada-Nya.<sup>58</sup>

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan suatu ukuran untuk melihat seberapa besar kontribusi dari masyarakat dalam dunia pasar kerja. Adanya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja juga bisa menjadi tolak ukur bagi umat muslim dalam memandang suatu pekerjaan. Hal ini dikarenakan, banyaknya ayat Al-Qur'an dan Hadist yang menyuruh manusia untuk senantiasa bekerja dan memanfaatkan berbagai hal diantaranya :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya : *“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”* (Q.S Al-A'raf: 10).<sup>59</sup>

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”* (Q.S Al-Jumuah: 10).<sup>60</sup>

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa kaum muslimin yang ingin mencapai kemajuan hendaknya berpartisipasi dalam dunia kerja dan senantiasa bekerja keras. Telah menjadi sunatullah di dunia bahwa kemakmuran akan dicapai oleh mereka yang bekerja

<sup>58</sup> Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2002), h.38

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2017)

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2017)

kerjas dan memanfaatkan segala potensinya untuk mencapai keinginannya. Tidak heran jika banyak orang beriman kepada Allah SWT., tetapi mau bekerja keras untuk mendapatkan kemakmuran di dunia walaupun di akhirat ia tetap celaka. Sebaliknya, adapula yang beriman kepada Allah SWT. tetapi tidak mau bekerja dan berusaha sehingga sulit untuk mencapai kemakmuran.

Dalam hadist pun menyatakan,

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كان داود -عليه السلام- لا يأكل إلا من عمل يده.»

وعن المقدم بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده

Dari Abu Hurairah, dari Nabi -*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*-, ia berkata, "*Dulu Daud -'Alaihissalām- tidak makan kecuali dari hasil kerja tangannya*". Dari Al-Miqdām bin Ma'di Karib -*radīyallāhu 'anhu*-, dari Nabi -*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*-, ia berkata, "*Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik dari makan hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabiullah Daud -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- dulunya makan dari hasil kerja tangannya*".<sup>61</sup>

Hadist ini lebih mempertegas tentang mulianya orang yang menggunakan tangan dan kemampuannya. Harta yang dihasilkan melalui kerja keras walaupun sedikit dipandang lebih berharga daripada harta warisan atau pemberian orang lain.

## 8. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berasaskan dengan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia

<sup>61</sup> Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2002), h. 116

dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah.

Menurut Hasanuzzaman, ekonomi Islam adalah ekonomi dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat.<sup>62</sup>

Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Berbeda dengan ekonomi islam, ekonomi konvensional lebih menekankan pada analisis terhadap masalah ekonomi dan alternatif solusinya. Dalam pandangan ini, tujuan ekonomi dan nilai-nilai dianggap hal yang sudah tetap (*given*) atau di luar dari bidang ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional tidak hanya dalam aspek cara penyelesaian masalah, namun juga dalam aspek cara memandang dan analisis terhadap masalah ekonomi. Ekonomi Islam melingkupi pembahasan atas perilaku ekonomi manusia yang sadar dan berusaha untuk mencapai mashlahah atau falah, yang disebut sebagai *homo islamicus*. Dalam hal ini, perilaku ekonomi meliputi solusi yang diberikan atas tiga permasalahan mendasar tersebut dan masalah-masalah turunannya.<sup>63</sup>

## **B. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir ialah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>64</sup> Maka dapat disusun suatu kerangka pikir dalam penelitian ini seperti yang disajikan dalam gambar dibawah ini :

---

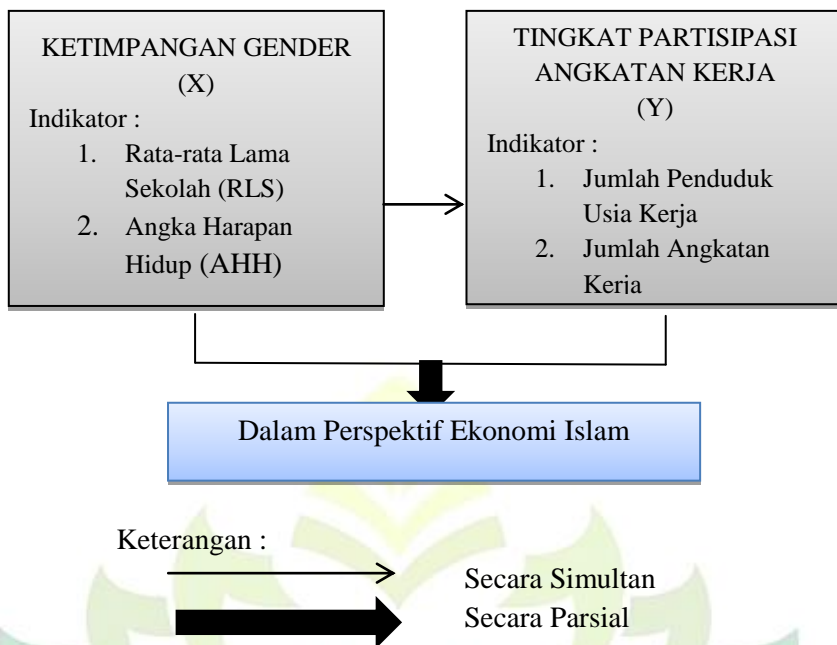
<sup>62</sup> Veithazal dan Andi Buchri, *Islam Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi solusi*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009), h. 11

<sup>63</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 19

<sup>64</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h 60



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



Berdasarkan kerangka berfikir yang ada diatas maka penulis menguraikan pada variabel X yaitu ketimpangan gender terhadap variabel Y yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dengan menggunakan asas-asas atau dasar-dasar hukum Islam yaitu Ekonomi Islam sebagai pedoman bagi penulis dalam penelitian ini.

### C. Pengajuan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.<sup>65</sup> Selanjutnya hipotesis akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

<sup>65</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 63

Dalam penelitian ini hipotesis yang akan diajukan adalah sebagai berikut :

H0 : Angka Harapan Hidup (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Y) di Provinsi Lampung pada Tahun 2015-2023

H1 : Angka Harapan Hidup (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Y) di Provinsi Lampung pada tahun 2015-2023

H0 : Rata-Rata Lama Sekolah (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Y) di Provinsi Lampung pada Tahun 2015-2023

H2 : Rata-Rata Lama Sekolah (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Y) di Provinsi Lampung pada tahun 2015-2023

H0 : Angka Harapan Hidup (X1) dan Rata-Rata Lama Sekolah (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Y) di Provinsi Lampung pada Tahun 2015-2023

H3 : Angka Harapan Hidup (X1) dan Rata-Rata Lama Sekolah (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Y) di Provinsi Lampung pada tahun 2015-2023

H4 : Tanggapan dalam Perspektif Ekonomi Islam mengenai Ketimpangan Gender dari segi Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) secara simultan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Lampung.